**JURNAL**

**PENGARUH KARAKTERISTIK KEPALA DESA,**

**FAKTOR MANAJERIAL KEPALA DESA, DAN**

**UKURAN PEMERINTAH DESA TERHADAP**

**KINERJA KEUANGAN DESA DI JAWA BARAT**

**Oleh:**

**HANIFAH**

**NPM. 189010014**

****

**PROGRAM DOKTOR ILMU MANAJEMEN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik kepala desa, faktor manajerial, dan ukuran pemerintah desa terhadap kinerja keuangan desa di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan berasal dari 4.805 desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan membagi desa menjadi tiga klaster: Berkembang, Maju, dan Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kepala desa seperti jenis kelamin dan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan pada kinerja keuangan desa. Faktor manajerial seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda tergantung klaster desa. Ukuran pemerintah desa yang diukur dari PADes per kapita memiliki pengaruh positif signifikan pada seluruh klaster. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas kepemimpinan desa serta kemandirian fiskal dalam mewujudkan tata kelola desa yang efektif.

**Kata Kunci**: kepala desa, kinerja keuangan, transparansi, partisipasi, ukuran pemerintah desa

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the influence of village head characteristics, managerial factors, and village government size on the financial performance of villages in West Java Province. The data covers 4,805 villages based on the 2023 Village Development Index (IDM). The method used is multiple linear regression, dividing villages into three clusters: Developing, Advanced, and Independent. The findings reveal that village head characteristics, such as gender and education, significantly affect financial performance. Managerial factors like transparency, accountability, and community participation show varying effects depending on the village cluster. The size of the village government, measured by village revenue per capita, consistently has a positive and significant effect. These results highlight the importance of strengthening village leadership capacity and fiscal independence to achieve effective local governance.

**Keywords**: village head, financial performance, transparency, participation, village government size

**RINGKESAN**

Panalungtikan ieu nyoba nganalisis pangaruh karakteristik kapala désa, faktor manajerial, jeung ukuran pamaréntahan désa kana kinerja kauangan désa di Propinsi Jawa Barat. Data nu dipaké asalna tina 4.805 désa dumasar kana Indeks Désa Membangun (IDM) taun 2023. Metoda nu dipaké nyaéta regresi linier berganda kalayan ngabagi désa jadi tilu klaster: Berkembang, Maju, jeung Mandiri. Hasilna nunjukkeun yén karakteristik kapala désa saperti jenis kelamin jeung tingkat atikan mibanda pangaruh signifikan kana kinerja kauangan désa. Faktor manajerial saperti transparansi, akuntabilitas, jeung partisipasi ngabogaan pangaruh anu béda-béda gumantung klasterna. Ukuran pamaréntahan désa (diukur tina PADes per kapita) mibanda pangaruh positif anu signifikan dina sagala klaster. Ieu nunjukkeun yén perlu aya usaha pikeun ningkatkeun kapasitas kapamimpinan jeung kemandirian fiskal pikeun ngawujudkeun pamaréntahan désa nu hadé.

**Kecap Konci**: kapala désa, kinerja kauangan, transparansi, partisipasi, ukuran pamaréntahan désa

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki peran strategis sebagai entitas pemerintahan terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengelola sumber daya serta pembangunan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Sutoro Eko (2016), yang menyatakan bahwa desa bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek yang berhak mengatur dirinya sendiri sesuai dengan prinsip rekognisi dan subsidiaritas.

Namun, implementasi kewenangan ini sangat bergantung pada kapasitas keuangan desa yang sebagian besar masih ditopang oleh transfer fiskal dari pusat. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa lebih dari 96% pendapatan desa nasional selama periode 2019–2023 berasal dari transfer pemerintah pusat dan daerah, sementara kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) kurang dari 3%. Provinsi Jawa Barat, salah satu provinsi dengan jumlah desa terbesar di Indonesia, mencatatkan PADes sebesar 2,24% pada 2023, masih di bawah angka ideal untuk menggambarkan kemandirian fiskal desa.

Di sisi lain, peningkatan jumlah desa berstatus mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian keuangan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah struktural dalam tata kelola dan kapasitas manajerial desa, termasuk pada aspek kepemimpinan kepala desa. Menurut Dwiyanto (2006), kualitas birokrasi lokal, termasuk di tingkat desa, sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpinnya dalam mengelola organisasi secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Teori *upper echelon* (Hambrick & Mason, 1984) menyatakan bahwa karakteristik pimpinan organisasi berpengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, karakteristik kepala desa seperti pendidikan, usia, masa jabatan, dan jenis kelamin diyakini memiliki kontribusi dalam menentukan kualitas pengelolaan keuangan desa. Ditambah lagi, faktor manajerial kepala desa, seperti kemampuan perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas, menjadi krusial dalam mengelola dana desa secara efektif (Kuncoro, 2013).

Namun demikian, laporan Indonesia Corruption Watch (ICW, 2024) menunjukkan bahwa kepala desa merupakan pihak dengan jumlah kasus korupsi terbanyak sepanjang 2023, yaitu 187 kasus. Fakta ini mempertegas urgensi kajian mendalam terhadap kualitas karakter dan manajemen kepala desa, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Berpijak pada kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh karakteristik kepala desa, faktor manajerial, dan ukuran pemerintah desa terhadap kinerja keuangan desa di Jawa Barat.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran karakteristik kepala desa, faktor manajerial, dan ukuran pemerintah desa di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana kinerja keuangan desa di Provinsi Jawa Barat?
3. Sejauh mana pengaruh karakteristik kepala desa terhadap kinerja keuangan desa?
4. Sejauh mana pengaruh faktor manajerial kepala desa terhadap kinerja keuangan desa?
5. Sejauh mana pengaruh ukuran pemerintah desa terhadap kinerja keuangan desa?
6. Seberapa besar pengaruh simultan ketiga variabel tersebut terhadap kinerja keuangan desa?

**Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan karakteristik kepala desa, faktor manajerial kepala desa, dan ukuran pemerintah desa di Provinsi Jawa Barat.
2. Menilai kinerja keuangan desa di Provinsi Jawa Barat.
3. Menganalisis pengaruh karakteristik kepala desa terhadap kinerja keuangan desa.
4. Menganalisis pengaruh faktor manajerial kepala desa terhadap kinerja keuangan desa.
5. Menganalisis pengaruh ukuran pemerintah desa terhadap kinerja keuangan desa.
6. Mengetahui pengaruh simultan ketiga variabel independen terhadap kinerja keuangan desa.

**Manfaat Penelitian**

**Secara Teoritis**, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang manajemen keuangan sektor publik, khususnya terkait pengaruh karakteristik dan kapabilitas kepemimpinan terhadap outcome fiskal di level pemerintahan desa.

**Secara Praktis**, hasil studi ini dapat digunakan oleh: Pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas kepala desa.

Lembaga pengawas dan masyarakat sipil sebagai dasar advokasi transparansi pengelolaan keuangan desa.

Peneliti selanjutnya sebagai rujukan untuk pengembangan kajian empiris di bidang tata kelola keuangan desa.

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

Kajian Pustaka Kajian pustaka dalam penelitian ini mencakup teori-teori dan temuan sebelumnya yang relevan dengan variabel-variabel penelitian, yaitu karakteristik kepala desa, faktor manajerial kepala desa, ukuran pemerintah desa, dan kinerja keuangan desa. Landasan teoritis dan penelitian terdahulu disusun untuk membentuk dasar pengembangan kerangka pemikiran dan hipotesis.

Manajemen Manajemen menurut Robbins dan Coulter (2018:44) meliputi empat fungsi: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Manajer perlu menjalankan peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan sebagaimana diuraikan Mintzberg (1993). Robert L. Katz juga menekankan pentingnya keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual dalam manajemen (Robbins dan Coulter, 2018:47). Perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi turut memengaruhi peran manajer.

Organisasi Organisasi adalah kesatuan sosial terstruktur untuk mencapai tujuan bersama (Robbins & Coulter, 2018:41). Efektivitas organisasi bergantung pada motivasi, komunikasi, interaksi, pengambilan keputusan, perumusan tujuan, dan kontrol (Holy & Miskel, 2001). Struktur, budaya, dan perilaku pemimpin juga menentukan kinerja organisasi (Sanders & Wiggins, 1985).

Manajemen Keuangan dan Keuangan Publik Manajemen keuangan mencakup pengambilan keputusan investasi, pembiayaan, dan pembagian laba untuk memaksimalkan nilai organisasi (Brigham & Houston, 2018). Dalam konteks publik, manajemen keuangan bertujuan memberikan layanan publik, memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money (Mardiasmo, 2018). Perbedaan mendasar antara manajemen keuangan privat dan publik meliputi fokus, tujuan, sumber dana, pengendalian, dan akuntabilitas.

Kinerja Organisasi Sektor Publik Kinerja sektor publik dinilai dari efektivitas, efisiensi, kualitas layanan, akuntabilitas, dan dampak sosial (Judijanto & Afandy, 2024). Alat ukur kinerja meliputi Balanced Scorecard (BSC), Logic Model, Key Performance Indicators (KPIs), Cost-Benefit Analysis (CBA), Cost-Effectiveness Analysis (CEA), Total Quality Management (TQM), dan analisis rasio keuangan. Rasio-rasio yang digunakan antara lain: kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi, dan pertumbuhan.

Kepemimpinan di Organisasi Publik Kepemimpinan publik mengharuskan pemimpin memiliki visi, integritas, dan kemampuan manajemen perubahan (Rifdan et al., 2024). Tantangan birokrasi, tuntutan transparansi, dan tekanan politik menuntut pemimpin publik untuk adaptif dan kolaboratif. Kepemimpinan wanita dan kepemimpinan visioner juga terbukti berdampak positif pada kinerja organisasi publik.

Hubungan Manajer dan Pemangku Kepentingan Teori Stewardship menyatakan bahwa manajer bertindak sebagai pelayan kepentingan organisasi dan publik (Donaldson & Davis, 1991). Berbeda dengan Teori Agensi, teori ini menekankan transparansi, akuntabilitas, dan motivasi intrinsik dalam pengambilan keputusan.

Karakteristik Biografis Pimpinan Publik Berdasarkan teori Upper-Echelons (Hambrick & Mason, 1984), karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan masa kerja pemimpin berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Pengaruh ini bervariasi tergantung konteks dan jenis organisasi.

Faktor Manajerial Faktor manajerial adalah aspek-aspek yang dikendalikan pimpinan seperti tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Mardiasmo, 2018). World Bank menyebut prinsip good governance meliputi efisiensi, demokrasi, antikorupsi, dan alokasi sumber daya yang adil.

Ukuran Pemerintah Desa Ukuran pemerintah desa mencerminkan kapasitas pelayanan publik. Indikatornya meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, aset, dan rasio pendapatan (Nazara, 2007; Pradana, 2024). Ukuran ini berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi keuangan desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan kewenangan dan tanggung jawab kepala desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Dana desa berasal dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, dan pendapatan asli desa. Pelaporan dan akuntabilitas menjadi bagian penting dari tata kelola keuangan desa.

Status Kemandirian Desa Kemandirian desa diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri dari indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Klasifikasi desa mencakup desa sangat tertinggal hingga desa mandiri (Permendesa No. 2 Tahun 2016).

Penelitian Terdahulu yang Relevan Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa karakteristik kepala daerah, faktor manajerial, dan ukuran pemerintah mempengaruhi kinerja keuangan baik secara positif maupun negatif. Variabel-variabel tersebut akan diuji dalam konteks desa di Jawa Barat.

Posisi Penelitian Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya dengan fokus pada desa di Jawa Barat dan menggunakan data terbaru tahun 2023. Penelitian menguji pengaruh karakteristik kepala desa, faktor manajerial, dan ukuran pemerintah desa terhadap kinerja keuangan desa.

Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dibangun berdasarkan teori manajemen, teori kepemimpinan publik, teori stewardship, teori upper-echelons, serta prinsip-prinsip good governance. Ketiga variabel independen (karakteristik kepala desa, faktor manajerial, dan ukuran pemerintah desa) diperkirakan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan desa.

Hipotesis Penelitian H1: Karakteristik kepala desa, faktor manajerial kepala desa, dan ukuran pemerintah desa berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa. H2: Jenis kelamin kepala desa berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa. H3: Tingkat pendidikan kepala desa berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa. H4: Masa kerja kepala desa berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa. H5: Transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa. H6: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa. H7: Partisipasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa. H8: Ukuran pemerintah desa berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa.

**METODOLOGI PENELITIAN**

**Metode yang Digunakan**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik variabel penelitian, sedangkan analisis verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan kausal antara variabel bebas dan terikat.  
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023. Analisis dilakukan dengan metode regresi linier berganda menggunakan software EViews 12 untuk mengukur pengaruh variabel-variabel independen terhadap kinerja keuangan desa.

**Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada 5.311 desa yang tersebar di 18 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan penelitian merujuk pada data IDM yang telah divalidasi pada tahun 2023.

**Desain Penelitian**

Desain penelitian mengacu pada proses sistematis yang mencakup:

1. Perumusan masalah
2. Pengumpulan data
3. Analisis data
4. Identifikasi faktor-faktor terkait
5. Pengambilan kesimpulan dan tindakan korektif  
   (Sumber: Tehubijuluw & Fanggidae dalam Rizan et al., 2022)

**Definisi dan Operasionalisasi Variabel**

**Definisi Variabel Penelitian**

* Variabel Bebas (X):
  + Karakteristik Kepala Desa (Jenis Kelamin, Pendidikan, Masa Kerja)
  + Faktor Manajerial (Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi)
  + Ukuran Pemerintah Desa (Pendapatan Desa Per Kapita)
* Variabel Terikat (Y):
  + Kinerja Keuangan Desa (Rasio Kemandirian Keuangan Desa)

**Operasionalisasi Variabel**

Lihat Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Skala** |
| Karakteristik Kepala Desa | Jenis Kelamin | 0 = Perempuan, 1 = Laki-laki | Ordinal |
|  | Pendidikan | SLTP–S3 (kode 1–6) | Ordinal |
|  | Masa Kerja | Lama menjabat (bulan) | Rasio |
| Faktor Manajerial | Transparansi | Media penyebaran APBDes | Interval |
|  | Akuntabilitas | Unggah laporan APBDes (dummy) | Ordinal |
|  | Partisipasi | Frekuensi musyawarah desa | Rasio |
| Ukuran Pemerintah Desa | PADes per Kapita | Total PADes / jumlah penduduk | Rasio |
| Kinerja Keuangan Desa | Rasio Kemandirian | PADes / Transfer × 100% | Rasio |

(Sumber: Peneliti, 2025)

**Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

* Sumber Data:

Data sekunder dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat (IDM 2023).

* Teknik Pengumpulan:

Metode dokumentasi dan studi kepustakaan.

**Teknik Penentuan Data**

* Populasi: 4.805 desa dengan data lengkap di Jawa Barat.
* Unit analisis: Desa

**Tabel 3.2 (sebaran per Kabupaten/Kota)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sebaran Populasi Desa di Jawa Barat** | **Kabupaten/Kota** | **Jumlah Desa** | **Status Desa** |
| **No.** | **Berkembang** | **Maju** | **Mandiri** |
| 1. | Kabupaten Bogor | 376 | 40 |
| 2. | Kabupaten Sukabumi | 334 | 86 |
| 3. | Kabupaten Cianjur | 317 | 118 |
| 4. | Kabupaten Bandung | 246 | 9 |
| 5. | Kabupaten Garut | 379 | 121 |
| 6. | Kabupaten Tasikmalaya | 324 | 115 |
| 7. | Kabupaten Ciamis | 244 | 7 |
| 8. | Kabupaten Kuningan | 337 | 44 |
| 9. | Kabupaten Cirebon | 367 | 44 |
| 10. | Kabupaten Majalengka | 308 | 11 |
| 11. | Kabupaten Sumedang | 229 | - |
| 12. | Kabupaten Indramayu | 288 | 46 |
| 13. | Kabupaten Subang | 227 | 26 |
| 14. | Kabupaten Purwakarta | 160 | 21 |
| 15. | Kabupaten Karawang | 279 | 112 |
| 16. | Kabupaten Bekasi | 152 | 39 |
| 17. | Kabupaten Bandung Barat | 142 | 3 |
| 18. | Kabupaten Pangandaran | 82 | - |
| 19. | Kota Banjar | 14 | - |
| 14. | Kabupaten Purwakarta | 160 | 21 |
| 15. | Kabupaten Karawang | 279 | 112 |
| 16. | Kabupaten Bekasi | 152 | 39 |
| 17. | Kabupaten Bandung Barat | 142 | 3 |
| 18. | Kabupaten Pangandaran | 82 | - |
| 19. | Kota Banjar | 14 | - |
| Jumlah | 4.805 | 842 | 2.306 |

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

**Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis**

**Rancangan Analisis**

* Analisis Deskriptif: Rata-rata, median, standar deviasi, persentase.
* Analisis Verifikatif: Regresi Linier Berganda untuk menguji hubungan kausal antar variabel.

**Model Regresi:**

𝑅𝐾𝐷=𝐹(𝐽𝐾,𝑇𝑃,𝑀𝐾𝐽𝐾,𝑇𝑃,𝑀𝐾,𝑇𝑅,𝐴𝐾,𝑃𝐴𝑅,𝑈𝑃𝐷,𝜀),\_atau 𝑅𝐾𝐷=𝛽0+𝛽1𝐽𝐾+𝛽2𝑇𝑃+𝛽3𝑀𝐾+𝛽4𝑇𝑅+𝛽5𝐴𝐾+𝛽6𝑃𝐴𝑅+𝛽7𝑈𝑃𝐷+𝜀

**Keterangan:**

* RKD = Rasio Kemandirian Desa
* JK = Jenis Kelamin
* TP = Tingkat Pendidikan
* MK = Masa Kerja
* TR = Transparansi
* AK = Akuntabilitas
* PAR = Partisipasi
* UPD = Ukuran Pemerintah Desa
* β₀…β₇ = Koefisien regresi
* ε = Error term

**Uji Kesesuaian Model (Goodness of Fit)**

Menggunakan koefisien determinasi (R²) dan perhitungan ESS, RSS, dan TSS sesuai model Gujarati (2004).

**Uji Koefisien Regresi**

* Uji F (Simultan): Untuk melihat pengaruh semua variabel X terhadap Y.
* Uji t (Parsial): Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y.

**Uji Asumsi Klasik**

* Uji Normalitas: Jarque-Berra
* Uji Multikolinearitas: Variance Inflation Factor (VIF)
* Uji Heteroskedastisitas: ARCH-LM Test

**Pengujian Hipotesis**

**Hipotesis yang akan diuji:**

* H1: Karakteristik, Faktor Manajerial, dan Ukuran Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Desa
* H2: Jenis Kelamin berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Desa
* H3: Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Desa
* H4: Masa Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Desa
* H5: Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Desa
* H6: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Desa
* H7: Partisipasi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Desa
* H8: Ukuran Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Desa

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap 4.805 desa di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik kepala desa, faktor manajerial, dan ukuran pemerintah desa terhadap kinerja keuangan desa, yang diukur melalui Rasio Kemandirian Desa (RKD).

Analisis dilakukan dengan membagi desa ke dalam tiga klaster, yakni: Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri. Model regresi linier berganda digunakan untuk masing-masing klaster, dan pemilihan variabel bebas meliputi jenis kelamin kepala desa, tingkat pendidikan, masa kerja, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan ukuran pemerintah desa.

Hasil regresi menunjukkan bahwa:

* Untuk klaster Desa Berkembang, variabel yang signifikan adalah Jenis Kelamin, Partisipasi, dan Ukuran Pemerintah Desa. Model terbaik menggunakan robust standard error menghasilkan persamaan:  
  RKD = -0,0047 + 0,0065(JK) - 0,00022(PAR) + 0,000000953(UPD)
* Untuk klaster Desa Maju, variabel yang signifikan adalah Partisipasi dan Ukuran Pemerintah Desa, dengan persamaan:  
  RKD = 0,00245 + 0,0000616(PAR) + 0,000000677(UPD)
* Untuk klaster Desa Mandiri, variabel signifikan adalah Tingkat Pendidikan, Akuntabilitas, dan Ukuran Pemerintah Desa, dengan persamaan:  
  RKD = 0,00366 + 0,000546(TP) – 0,00116(AK) + 0,000000608(UPD)

Koefisien determinasi (R²) untuk model-model terbaik menunjukkan nilai yang tinggi di atas 91%, mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi RKD dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas tersebut.

**PEMBAHASAN**

**Karakteristik Kepala Desa**

Karakteristik demografis kepala desa, terutama jenis kelamin dan tingkat pendidikan, menjadi salah satu penentu kinerja keuangan desa. Sebagian besar kepala desa di Jawa Barat berjenis kelamin laki-laki (di atas 90% pada semua klaster). Ini menunjukkan masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan desa. Menurut Putnam (1993), keberagaman sosial dan partisipasi yang merata dalam pemerintahan desa dapat meningkatkan efektivitas institusi lokal.

Tingkat pendidikan kepala desa menunjukkan kecenderungan positif terhadap kinerja keuangan desa. Mayoritas kepala desa memiliki pendidikan SLTA sederajat, namun peningkatan tingkat pendidikan (S1 dan S2) lebih dominan pada desa mandiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Robbins dan Judge (2015), pemimpin yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki kapasitas kognitif dan keterampilan manajerial yang lebih baik dalam mengelola sumber daya publik.

**Faktor Manajerial Kepala Desa**

Variabel manajerial yang diuji mencakup masa kerja, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

* Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan, terutama pada Desa Berkembang dan Desa Maju. Sayangnya, pengaruhnya negatif, yang mungkin disebabkan oleh kualitas partisipasi yang rendah atau prosedural semata tanpa keterlibatan substantif warga (Arnstein, 1969).
* Transparansi yang diukur melalui kanal publikasi APBDes belum sepenuhnya optimal. Desa Mandiri lebih banyak memanfaatkan media digital dan sosial dalam publikasi APBDes dibandingkan Desa Berkembang. Hal ini sejalan dengan pandangan Fung dan Wright (2001) bahwa transparansi informasi publik meningkatkan akuntabilitas horizontal dalam tata kelola lokal.
* Akuntabilitas hanya signifikan di Desa Mandiri dan berpengaruh negatif. Hal ini bisa terjadi karena peningkatan akuntabilitas formal belum tentu diikuti dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan sosial yang efektif.

**Ukuran Pemerintah Desa**

Ukuran Pemerintah Desa yang diukur berdasarkan besaran PADes per kapita terbukti menjadi variabel yang konsisten berpengaruh signifikan dan positif terhadap Rasio Kemandirian Desa pada semua klaster. Hal ini menegaskan pendapat Mardiasmo (2002) bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah, termasuk desa, sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal yang dimiliki. Desa dengan kapasitas PADes yang tinggi memiliki keleluasaan untuk membiayai program pembangunan secara mandiri.

Hasil ini juga menunjukkan ketimpangan fiskal antar desa masih cukup besar, mengingat terdapat 759 desa dengan PADes sebesar Rp0. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masih banyak desa yang bergantung pada dana transfer dan belum mampu menggali potensi ekonomi lokal.

**Implikasi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kinerja keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas fiskal, tetapi juga oleh kapasitas kepala desa dalam mengelola tata kelola desa secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi kepala desa melalui pelatihan, peningkatan pendidikan formal, serta penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan strategis.

Sebagaimana dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1992), pemerintahan yang efektif adalah yang mampu mendorong inovasi lokal, pemberdayaan komunitas, dan tata kelola yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana karakteristik kepala desa, faktor manajerial kepala desa, serta ukuran pemerintah desa mempengaruhi kinerja keuangan desa yang diukur melalui Rasio Kemandirian Desa (RKD). Berdasarkan hasil analisis regresi pada masing-masing klaster desa (Desa Berkembang, Maju, dan Mandiri), diperoleh beberapa kesimpulan utama:

Pertama, karakteristik kepala desa memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap kinerja keuangan desa. Variabel jenis kelamin terbukti signifikan dalam memengaruhi RKD pada Desa Berkembang. Hasil ini mendukung temuan Eagly & Johannesen-Schmidt (2001) yang menyatakan bahwa perbedaan gaya kepemimpinan berdasarkan gender dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan di sektor publik. Sementara itu, tingkat pendidikan berpengaruh signifikan pada klaster Desa Mandiri, yang mengindikasikan bahwa kompetensi formal kepala desa turut menentukan kapasitas pengelolaan fiskal desa. Robbins dan Judge (2015) menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Kedua, faktor manajerial kepala desa yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menunjukkan hasil yang beragam antar klaster. Transparansi berpengaruh positif signifikan di Desa Berkembang, namun menunjukkan pengaruh negatif di Desa Maju dan tidak signifikan di Desa Mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan efisiensi fiskal, sebagaimana dikritisi oleh Hood (1991) yang menyatakan bahwa transparansi bisa bersifat simbolik apabila tidak diiringi oleh akuntabilitas yang kuat.

Akuntabilitas justru menunjukkan pengaruh negatif di dua klaster (Berkembang dan Mandiri), menandakan bahwa pelaporan yang tinggi tidak serta merta meningkatkan kinerja keuangan, bisa jadi karena pelaporan hanya bersifat administratif tanpa pengawasan substantif. Di sisi lain, partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif hanya di Desa Maju. Hal ini menguatkan pandangan Arnstein (1969) bahwa efektivitas partisipasi sangat ditentukan oleh tingkat kedalaman dan keterlibatan warga secara nyata, bukan hanya sekadar prosedural.

Ketiga, ukuran pemerintah desa (yang diukur dari besaran PADes per kapita) merupakan variabel yang secara konsisten berpengaruh positif signifikan terhadap Rasio Kemandirian Desa di semua klaster. Hal ini sejalan dengan teori kapasitas fiskal daerah oleh Oates (1972), yang menyatakan bahwa semakin besar kapasitas keuangan lokal, maka semakin besar pula potensi daerah tersebut untuk otonom dan mandiri secara fiskal.

**SARAN**

Berdasarkan hasil temuan penelitian, disampaikan beberapa saran strategis sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, perlu meningkatkan program pembinaan kepala desa secara berjenjang dan berbasis kompetensi, dengan memperhatikan karakteristik personal seperti tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, agar lebih responsif dalam mengelola keuangan desa. Pelatihan yang diarahkan pada penguatan kapasitas fiskal dan pengelolaan berbasis data akan sangat penting.
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi secara substantif, perlu dikembangkan sistem pengawasan partisipatif desa yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Sejalan dengan konsep good governance (UNDP, 1997), keberhasilan tata kelola publik ditentukan oleh keterbukaan informasi yang dibarengi dengan sistem pengawasan efektif.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang memasukkan variabel lain, seperti kepemilikan sumber daya alam, potensi wisata desa, atau kualitas sumber daya manusia desa sebagai determinan kemandirian fiskal, untuk memperkaya analisis dan formulasi kebijakan.
4. Hasil ini juga memberikan sinyal bagi pemangku kebijakan bahwa ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat harus mulai dikurangi dengan mendorong inovasi pendapatan asli desa. Desa dengan kapasitas fiskal tinggi terbukti lebih mampu mandiri dalam pembangunan, sebagaimana disarankan oleh Mardiasmo (2002), bahwa kemandirian fiskal adalah fondasi utama keberlanjutan pembangunan daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2018). Fundamentals of Financial Management. 15th Edition. Cengage Learning.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64.

Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Eagly, A. H., & Johannesen-Schmidt, M. C. (2001). The Leadership Styles of Women and Men. Journal of Social Issues, 57(4), 781–797.

Fung, A., & Wright, E. O. (2001). Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance. Politics & Society, 29(1), 5–41.

Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics (4th ed.). McGraw-Hill International.

Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. Academy of Management Review, 9(2), 193–206.

Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons?. Public Administration, 69(1), 3–19.

Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). Laporan Tren Korupsi Tahun 2023. Jakarta: ICW.

Judijanto, & Afandy, D. (2024). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta: Prenada Media.

Kuncoro, M. (2013). Manajemen Pembangunan dan Perencanaan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2018). Manajemen Keuangan Daerah dan Good Governance. Yogyakarta: Andi.

Mintzberg, H. (1993). Structure in Fives: Designing Effective Organizations. New Jersey: Prentice Hall.

Nazara, S. (2007). Keuangan Pemerintah Daerah dan Otonomi. Jakarta: LPEM UI.

Oates, W. E. (1972). Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government. Reading, MA: Addison-Wesley.

Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.

Rifdan, A., Muchtar, N., & Anwar, S. (2024). Kepemimpinan Publik: Antara Harapan dan Tantangan. Bandung: Alfabeta.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). Management. 14th Edition. Pearson Education.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). Organizational Behavior. 16th Edition. Pearson.

Sanders, M. G., & Wiggins, C. D. (1985). Effective Schools and Effective Principals: What Do We Know?. NASSP Bulletin, 69(479), 37–43.

Sutoro Eko. (2016). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: INSISTPress.

UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development. United Nations Development Programme.